

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan pada bulan September sampai November 2023.

3.2 Jenis Data

3.2.1 Jenis Data Menurut Sifat

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian berbentuk deskriptif kuantitatif dengan metode analisis data menggunakan analisis rasio keuangan. Dalam penelitian ini data kuantitatif terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah kabupaten lembata tahun anggaran 2019-2022.

3.2.2 Jenis Data Menurut Sumber

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat atau objek penelitian penganggaran dan belanja pemerintah daerah Kabupaten Lembata, Laporan Target dan Realisasi APBD.
2. Data Sekunder yaitu data yang berasal dari catatan-catatan atau laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten lembata, misalnya laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintah daerah kabupaten lembata serta dokumen-dokumen pemerintah daerah kabupaten lembata lainnya, dan berbagai dokumen administrasi lainnya yang dikumpulkan, disajikan dan diolah oleh pihak lainnya.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

Teknik Dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data dan mempelajari dokumen-dokumen yaitu laporan keuangan dan dokumen administrasi lainnya.

3.4 Definisi Operasional Variabel

1. Analisis rasio keuangan adalah salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam APBD.
2. Rasio Kemandirian adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
3. Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan, dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.
4. Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
5. Halim (2012) dan Pramono (2014:25) menjelaskan bahwa rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal.

6. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah.
7. Rasio Retribusi Daerah ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah.
8. Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dan lain-lain PAD yang sah.

3.5 Teknik Analisa Data

Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan bantuan rasio keuangan yakni rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pajak daerah, rasio retribusi daerah, rasio lain-lain PAD yang sah. Rasio keuangan tersebut digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten lembata. kinerja keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah yaitu:

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio derajat desentralisasi fiskal adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan. Rasio derajat desentralisasi fiskal juga menggambarkan besarnya campur tangan pemerintah pusat dalam pembangunan daerah yang menunjukkan tingkat kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Purba dan Hutabarat, 2017).

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$RDDF = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.1
Skala Interval Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

rasio derajat desentralisasi fiskal	Kriteria
00,00 – 10,00%	Sangat Kurang
10,01 – 20,00%	Kurang
20,01 – 30,00%	Cukup
30,01 – 40,00%	Sedang
40,01 – 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat Baik

Sumber: purba dan hutabarat (2017)

b. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan Keuangan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Untuk menghitung Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Skala interval Rasio Ketergantungan

Rasio Kemandirian (%)	Kriteria
0 – 25	Sangat rendah
25-50	rendah
50-75	sedang
75-100	Tinggi

Sumber: Halim (2012)

c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Menunjukkan Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat

yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3.3
Skala interval Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian (%)	Kriteria
0 – 25	Sangat rendah
25-50	rendah
50-75	sedang
75-100	Tinggi

Sumber: Halim (2012)

d. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Total Realisasi PAD tahun}}{\text{Total Anggaran PAD tahun}}$$

Tabel 3.4
Skala Interval Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD (%)	Kategori
< 75	Tidak efektif
75-89	Kurang efektif
90-99	Cukup efektif
100	Efektif
>100	Sangat efektif

Sumber: Pranomo (2014)

e. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya

biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio Efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.5
Kriteria Penilaian Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi %	Kriteria
Diatas 100%	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat efisien

Sumber: Pranomo (2014)

f. Rasio Keserasian Belanja

Halim (2012) dan Pramono (2014:25) menjelaskan bahwa rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentasi belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Rasio keserasian terdiri dari rasio belanja operasi terhadap total belanja dan rasio belanja modal terhadap total belanja.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 3.6
Kriteria Penilaian Keserasian Belanja

Rasio Keserasian Belanja	Kriteria
0 – 20	Tidak Serasi
>20 - 40	Kurang Serasi
>40 - 60	Cukup Serasi
>60 - 80	Serasi
>80 - 100	Sangat Serasi

Sumber : Halim (2012)

g. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggaran mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010). Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian (Abdul Halim, 2007). Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah (TPD), PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah

positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode satu ke periode berikutnya. Jika semakin tinggi nilai TPD, PAD, dan Belanja Operasi yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Modal, maka pertumbuhannya adalah negatif. Artinya bahwa daerah belum mampu meningkatkan pertumbuhan daerahnya.

h. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari pajak daerah. Formula Pajak Daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pajak Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.7
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 dalam Roro Tahun 2015

i. Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dari retribusi daerah. formula Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Retribusi Daerah terhadap PAD} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.8
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.

690.900.327 dalam Roro Tahun 2015

j. Rasio Lain-lain PAD yang sah terhadap PAD

Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan dan lain-lain PAD yang sah. Formula rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio lain-lain PAD yang sah terhadap PAD} = \frac{\text{lain-lain PAD yang sah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3.9
Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Lain-lain PAD yang sah

Presentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.

690.900.327 dalam Roro Tahun 2015